



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TANGGAL 18 S.D 20 MARET 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2022



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DALAM RANGKA KESIAPAN BUMN UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
NTB “SPORT TOURISM DESTINATION”
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 18 S.D. 20 MARET 2022**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Kunjungan Kerja

Pasal 67 dan 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, diatur bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Jasa Raharja dan PT Asuransi Kredit Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat didasarkan pada aturan pada Undang-Undang tersebut. Selain itu, pelaksanaan kunjungan ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021 – 2022, dan Keputusan Rapat Internal Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021 – 2022.

B. Objek Kunjungan Kerja.

Objek kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI adalah PT Jasa Raharja dan PT Asuransi Kredit Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Asuransi BUMN.

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana strategi yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, dan Persaingan Usaha.

Secara khusus, kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PT Jasa Raharja dan PT Asuransi Kredit Indonesia, terkait pengawasan terhadap kinerja Operasional Perusahaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dilaksanakan dengan agenda pertemuan dengan Direktur Utama PT Jasa Raharja dan Direktur Operasional PT Asuransi Kredit Indonesia.

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1	A-352	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.	PIMP. / F-NASDEM
2	A-196	ADISATRYA SURYO SULISTO	F.PDIP
3	A-170	RIEKE DIAH PITALOKA	F.PDIP
4	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.	F.PG
5	A-135	HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.	F.GERINDRA
6	A-353	H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.	F.NASDEM
7	A-36	IR. H. M. NASIM KHAN	F.PKB
8	A-544	DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	F.PD
9	A-554	Dr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Comm., M.Sc.	F.PD
10	A-409	RAFLI	F.PKS
11	A-500	DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.	F.PAN

II. INFORMASI DAN HASIL KUNJUNGAN

Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. PT JASA RAHARJA

PT Jasa Raharja merupakan perusahaan Asuransi yang bersifat monopoli, memiliki *Captive Market* dengan penetrasi pasar 100% Besaran Nilai Santunan, Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan, dengan tugas:

1. Memberikan Santunan, kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Program Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan.
2. Asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum.
3. Menghimpun dan mengelola dana, dari masyarakat guna memenuhi pemberian hak masyarakat atas santunan.
4. Asuransi kecelakaan lalu lintas.

- Sinergi dengan Mitra

Sinergi yang dijalin untuk Kemudahan & Kecepatan Pelayanan Santunan, Dengan demikian masyarakat hanya perlu untuk melaporkan kecelakaan kepada kepolisian, selanjutnya Jasa Raharja yang bekerja secara proaktif

untuk memberikan pelayanan kepada korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum.

Adapun Mitra-mitra yang sudah bersinergi adalah Korlantas Polri, Rumah Sakit, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Perbankan.

- Asuransi Sosial dan Sistem Jaminan Nasional

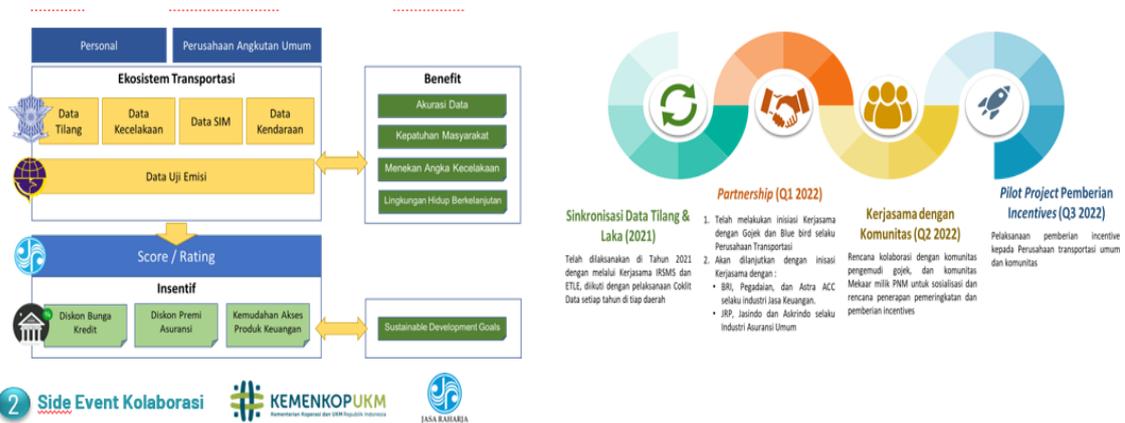
Sinergi Antar Penjamin Bagi Korban Laka Lantas

PMK No. 141/PMK.02/2018 Tentang Koordinasi Manfaat Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan

- BPJSTK: Sebagai Penjamin Lanjutan Setelah Plafon JR Habis Bagi Para Karyawan Peserta BPJSTK Korban Laka Lantas Pada Jam Kerja.
- Taspen: Sebagai Penjamin Lanjutan Setelah Plafon JR Habis Bagi Para PNS Peserta Taspen Korban Laka Lantas Pada Jam Kerja.
- Asabri: Sebagai Penjamin Lanjutan Setelah Plafon Jr Habis Bagi Tni - Polri Korban Laka Lantas Pada Jam Kerja.
- BPJS Kesehatan: Sebagai Penjamin Pertama Korban Laka Lantas Diluar Jaminan JR (Contoh: Kecelakaan Tunggal) dan Sebagai Penjamin Lanjutan Korban Laka Lantas Peserta BPJS Dan Terjamin JR Yang Biayanya Lebih.

- Rencana Partisipasi Pada G20

Merupakan project pemeringkatan Perusahaan Transportasi Umum maupun Personal untuk meningkatkan kesadaran keselamatan lalu lintas, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta menciptakan kesinambungan lingkungan karena mengurangi emisi, dengan memberikan award melalui incentives produk produk Lembaga Jasa keuangan.



Inisiasi Kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam kegiatan *side event* pada G20 Tahun 2022 dengan memberdayakan UMK-UMK dalam partisipasi pada G20, diantaranya yaitu pemberdayaan perempuan, disabilitas, dan produk ramah lingkungan.

- **Rencana Partisipasi Pada Event MotoGP Mandalika**

Pengembangan UMKM di desa penyangga Mandalika

- Peserta : 20 UMKM
- Sektor : *Food & Beverage*
- Tujuan : UMKM Naik Kelas dengan peningkatan kualitas produk dan bantuan pengurusan perijinan
- Timeline :
 - ✓ Sesi 1 = kewirausahaan dan perubahan mindset (tgl 3 Maret 2022)
 - ✓ Sesi 2 = *Digital Marketing* Dasar (tgl 9 Maret 2022)
 - ✓ Sesi 3 = Management usaha dan Packaging (tgl 13 Maret 2022)
- Kolaborasi 8 BUMN : Jasa Raharja, Taspen, Pelindo, Jamkrindo, Jasindo, BPUI, Askrindo, dan ASDP

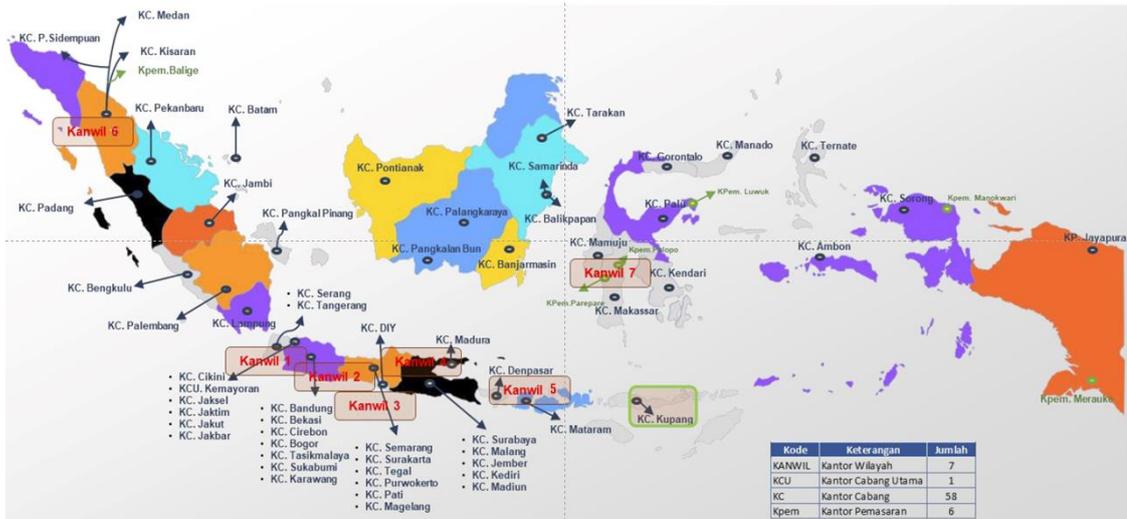
- **Penanaman Pohon Tabebuaya**

- Bantuan : 50 Pohon
- Lokasi penanaman : Kawasan by pass BIL-KEK Mandalika
- Waktu Pelaksanaan : Kamis, tgl 10 Maret 2022
- Kolaborasi BUMN di Mandalika (PIC Pelindo)

- **Penyerahan Sarana Prasarana ke Polda NTB**

Bantuan alat pencegahan kecelakaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MotoGP mandalika.

2. PT ASKRINDO KREDIT INDONESIA



PT Askrindo terus berupaya untuk dapat meningkatkan rasio kredit UMKM dengan ikut berperan terhadap penjaminan kredit yang disalurkan mitra perbankan baik melalui perjanjian Kerjasama maupun pemberdayaan UMKM secara langsung.

Askrindo melalui program pendampingan UMKM memiliki fungsi dan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan pemasaran dan kewirausahaan bagi UMKM sehingga kinerja penjualannya akan terus meningkat.

Kesiapan Askrindo dalam penyelenggaraan Pertemuan G-20 dan Moto GP 2022, dari dukungan produk penjaminan Askrindo adalah sebagai berikut:

Proyek yang dijamin Askrindo berjumlah 11 Proyek dengan Total Nilai Jaminan sebesar Rp. 246,6 Milyar.

Jenis proyek :

- *Constuction of Core Infrastructure*
- *Duck & Drainase*
- Pekerjaan Tanah dan Normalisasi Sungai
- Pekerjaan Jalan

COB & Jenis Jaminan :

a. Kontra Bank Garansi (KBG) - Bank BRI

Dua Jaminan Pelaksanaan dan Satu Jaminan Uang Muka dengan Total Nilai Jaminan Sebesar Rp. 54,7 Milyar

- b. Kontra Bank Garansi (KBG) - Bank Mandiri
Empat Jaminan Uang Muka dengan Total Nilai Jaminan Sebesar Rp. 138,7 Milyar.
- c. Surety Bond
Empat Jaminan Pelaksanaan dengan Total Nilai Jaminan Sebesar Rp. 53,1 Milyar

Obligee :

- PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/*Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC)
- Joint Operation Utama Karya – Adhi Karya

Kendala yang dihadapi oleh Askrindo saat menyiapkan penyelenggaraan adalah: Saat ini tidak ditemukan kendala yang berarti pada saat mempersiapkan penyelenggaraan Moto GP di sirkuit Mandalika, Tidak ditemukannya kendala yang berarti dikarenakan PT Askrindo selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan setiap *stakeholder* di provinsi Nusa Tenggara barat.

Strategi bisnis apa yang dilakukan Askrindo untuk bisa mengambil peluang yang ada dari dua moment tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Selalu menjalin komunikasi dengan para pihak pemangku kepentingan.
- b) Berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Provinsi maupun tingkat Nasional oleh para pelaku industri jasa keuangan dalam hal mensukseskan terselenggaranya *event* Moto GP di Sirkuit Mandalika.
- c) Memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang arti pentingnya berasuransi.

Manfaat yang bisa diberikan Askrindo untuk masyarakat di Provinsi NTB dalam penyelenggaraan pertemuan G-20 dan Moto GP 2022 adalah sebagai berikut:

1. UMKM Expo.
2. Dukungan Mobil Pintar.
3. Penanaman Pohon.

III. REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan kepada PT Jasa Raharja dan PT Asuransi Kredit Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada saat pelaksanaan kunjungan kerja spesifik, ada beberapa rekomendasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Jasa Raharja dan PT Asuransi Kredit Indonesia untuk bisa mengambil peluang dalam moment Internasional Presidensial G20 dan MotoGP 2022 tersebut untuk mengembangkan investasi dan Pasar Finansialnya.
2. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Jasa Raharja agar penempatan dana jangan bermasalah dan apabila terjadi kecelakaan agar dapat diselesaikan dengan cepat dan baik.
3. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Jasa Raharja dan PT Asuransi Kredit Indonesia untuk asuransi bagi UMKM sebagai kreditur supaya ada jaminannya.
4. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Jasa Raharja dan PT Asuransi Kredit Indonesia untuk lebih menggalakkan pariwisata di Indonesia dan BUMN sektor pariwisata harus saling bersinergi dengan BUMN lain.
5. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Jasa Raharja untuk melakukan kajian khusus terkait jalan raya yang berpotensi mengundang kecelakaan lalu lintas.
6. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia untuk lebih aktif lagi mencari potensi pasar yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.
7. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Jasa Raharja dan PT Asuransi Kredit Indonesia untuk memperhatikan potensi BUMN secara kultural seperti NTB yang tercermin dengan Budaya keislamannya yang saat ini kurang terlihat di publik.

**KETUA TIM KUNKER SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

TTD.

Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.
A – 544

IV. DOKUMENTASI KEGIATAN



